

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti mengambil beberapa poin kesimpulan, yakni;

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait peran *street-level bureaucracy* dalam kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Arjowinangun Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen dilakukan dengan baik. Peran Perangkat Desa sebagai *street-level bureaucrats* dapat mempengaruhi keberhasilan dalam meningkatkan Indeks Desa Membangun Desa Arjowinangun. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat desa telah mampu mengelola pembangunan desa dengan baik melalui keputusan dan kebijakan terkait pembangunan desa. Hal ini terwujud dalam tiga hal antara lain penerapan fungsi kontrol yang baik oleh perangkat Desa, peran yang fokus pemberdayaan Pada Sektor Usaha Tani, dan kredibilitas dan profesionalitas perangkat desa sebagai Birokrasi Garis Depan. Hal ini dapat disimpulkan pendekatan yang terstruktur dan partisipatif berhasil meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa secara signifikan.

Fokus utama kebijakan ini adalah pada pengembangan sektor pertanian dan infrastruktur pendukungnya, seperti saluran irigasi dan jalan usaha tani, yang telah meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memperkuat

ketahanan lingkungan melalui pelestarian alam yang optimal. Profesionalisme perangkat desa memainkan peran penting dalam keberhasilan ini, dengan struktur pemerintahan yang jelas dan terorganisir serta komunikasi yang efektif. Setiap perangkat desa memahami tugas dan tanggung jawabnya, yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Komunikasi yang terbuka dan partisipatif dengan masyarakat juga terbukti krusial, memastikan bahwa kebijakan yang diambil relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kolaborasi dengan pihak eksternal, termasuk lembaga pemerintah, swasta, dan non-pemerintah, memungkinkan diversifikasi pendekatan dan alokasi sumber daya yang lebih besar, yang mendukung program-program pembangunan desa.

## **5.2. Saran**

Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya untuk mempertajam kajian indeks desa membangun dalam perspektif governance (tata kelola) khususnya pemerintahan desa, karena untuk mengetahui ketercapaian pembangunan desa bukan hanya menurut peningkatan statistik dan grafik, ketercapaian pembangunan harus berdasarkan prinsip governance dan good government, hal ini melihat masyarakat sebagai subjek pembangunan bukan objek pembangunan.